

Peran Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian: Suatu Kajian Literatur

Edi Irawan

Universitas Teknologi Sumbawa

Alamat: Jl. Olat Maras Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa

Korespondensi penulis: edi.irawan@uts.ac.id

Abstract. *Based on the results of the discussion, it can be concluded that the objectives of fiscal policy are to increase the rate of investment, to encourage socially optimal investment, to increase employment opportunities, to increase economic stability in the midst of international instability, to tackle inflation, to increase and distribute the national income. Then there is the role of fiscal policy in the economy, namely: the role of the government's fiscal actions in contributing to greater national income levels. Thus it is expected that with the existence of fiscal policy, the government can try to avoid the economy from unwanted conditions such as situations where there is a lot of unemployment, inflation, the international balance of payments continues to be in deficit and so on.*

Keywords: *Role, Fiscal Policy, Economy.*

Abstrak. Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan fiskal yaitu meningkatkan laju investasi, Untuk Mendorong Investasi Optimal Secara Sosial, Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja, Untuk Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Ditengah Ketidakstabilan Internasional, Untuk Menanggulangi Inflasi, Untuk Meningkatkan Dan Mendistribusikan Pendapatan Nasional. Kemudian adapun peran dari kebijakan fiskal dalam perekonomian yaitu: peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti misalnya keadaan dimana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus menerus defisit, dan sebagainya.

Kata kunci: Peran, Kebijakan Fiskal, Perekonomian

LATAR BELAKANG

Fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara atau kerajaan yang dikumpulkan dari masyarakat dan oleh pemerintahan negara atau kerajaan dianggap sebagai pendapatan lalu digunakan sebagai pengeluaran dengan program-program untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan perekonomian serta digunakan pula sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian.

Beberapa yang mengemukakan pendapat mengenai definisi kebijakan fiskal seperti: Rahayu, Ani Sri, (2014), fiscal policy adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik atau sesuai dengan yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sudirman, I. Wayan. (2011), instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah dan pajak, dimana pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah yang diatur oleh undang-undang untuk pembiayaan umum dari pemerintah dalam

rangka menjalankan fungsi pemerintah dan tidak mengandung unsur imbalan individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak. Menurut Mangun, N. (2011) , fiscal policy adalah kebijakan dalam ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik.

Kebijakan fiskal yang sering juga disebut “politik fiskal” atau “fiscal policy”, biasa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Oleh karena anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan berupa hasil pungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa “government expenditure” dan “government transfer”, maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak memperbesar atau memperkecil “government expenditure” dan atau memperbesar atau memperkecil “government transfer” yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.

Sedangkan menurut beberapa ahli pengertian dari kebijakan fiskal seperti yang dikemukakan diantaranya: Mankiw, N. (2013) Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Sedangkan menurut Nopirin, Ph. D. 1987, kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat. Indikator yang biasa dipakai adalah budget defisit yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga pembayaran transfer) dengan penerimaan terutama dari pajak.

Berdasarkan dari beberapa teori dan pendapat yang dijelaskan di atas dapat kita simpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Beberapa definisi diatas peneliti akan mengangkat peran dari kebijakan fiskal terhadap roda perekonomian yang ditinjau dari studi literatur.

KAJIAN TEORITIS

Filosofi kebijakan fiskal didasari oleh sebuah teori ekonomi Keynes yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes, ekonom asal Inggris pada abad ke-20 dalam upaya memahami Great Depression (Setiawan, 2018:24). Great Depression merupakan sebuah peristiwa yang diawali oleh ledakan spekulasi dan diakhiri dengan kejatuhan harga saham di pasar saham Wall Street. Kepercayaan publik lenyap setelah jatuhnya pasar saham dan berdampak pada penurunan daya beli, penyusutan investasi, guncangan sektor industri, serta maraknya pengangguran yang menyebabkan peningkatan kredit macet. Krisis ekonomi berkepanjangan di Amerika Serikat selama tahun 1929 hingga 1939 ini, merupakan sebuah kondisi perlambatan ekonomi tajam yang bukan hanya berimbas pada negara yang mengalaminya, namun juga menjadi guncangan untuk perekonomian dunia. Menurut M, Suparmoko. (2013), pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan studi literatur atau library research. Mengkaji dan menelaah buku-buku literatur sesuai dengan teori yang dibahas khususnya di lingkup konsep peran kebijakan fiskal dalam perekonomian. Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (H.Ali & Limakrisna, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan fiskal dari sudut pandang ekonomi makro dibedakan menjadi dua macam Adiyanta, F. S. (2020), yaitu kebijakan fiskal kontraktif dan kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal kontraktif dirancang untuk mengekang inflasi yang cepat, sedangkan kebijakan fiskal ekspansif dirancang untuk mendorong ekonomi dan menghindari resesi. Dalam kondisi ekonomi overheating akibat kenaikan daya beli masyarakat yang berlebih, kebijakan fiskal kontraktif berperan melakukan penurunan pengeluaran pemerintah atau peningkatan pendapatan pajak. Kebijakan fiskal kontraktif ini bertujuan untuk menyeimbangkan kondisi permintaan dan penyediaan barang maupun jasa yang menjadi sumber perekonomian. Sebaliknya dalam kondisi ekonomi yang sedang lesu, kebijakan fiskal ekspansif berperan melakukan peningkatan pengeluaran pemerintah maupun penurunan pajak.

Kebijakan ekspansif ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan mengurangi pengangguran yang ada.

Di Indonesia, kebijakan fiskal mempunyai dua prioritas. Prioritas pertama adalah mengatasi APBN, dan masalah – masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil daripada pengeluarannya. Prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan antara lain laju pertumbuhan ekonomi, tingkat atau laju pertumbuhan inflasi, jumlah kesempatan kerja/pengangguran dan saldo neraca pembayaran.

Apabila APBN defisit, pemerintah hanya mempunyai dua pilihan untuk membiayai saldo negatif tersebut, yaitu didanai oleh Bank Indonesia lewat printing money yang berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat, atau melebihi pinjaman, baik dari dalam negeri, misalnya dengan menerbitkan obligasi, atau dari luar negeri (cara yang kedua ini berarti ekonomi tidak lagi tertutup). Karena opsi pertama tersebut sangat berisiko terhadap peningkatan laju inflasi, maka biasanya opsi kedua yang dipilih.

Tujuan Kebijakan Fiskal.

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalannya memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N). Kemudian tujuan kebijakan fiskal juga yaitu untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga, implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan semakin kompleksnya struktur ekonomi perdagangan dan keuangan. Maka semakin rumit pula cara penanggulangan inflasi. Kombinasi beragam harus digunakan secara tepat seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perdagangan dan penentuan harga.

Menurut Adiningsih, Sri. (2013), adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakkan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut:

Untuk Meningkatkan Laju Investasi.

Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi di sektor swasta dan sektor negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertentu. Dalam rangka itu pemerintah harus menerapkan kebijakan investasi berencana di sektor publik, namun pada kenyataannya di beberapa negara berkembang dan tertinggal terjadi suatu problem yaitu dimana langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi dan terjadi investasi di jalur yang tidak produktif dari masyarakat

di negara tersebut. Hal ini disebabkan tidak tersedianya modal asing yang cukup, baik swasta maupun pemerintah. Oleh karena itu kebijakan fiskal memberikan solusi yaitu kebijakan fiskal dapat meningkatkan rasio tabungan inkremental yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan, memacu, mendorong dan menghambat laju investasi. Menurut Soetrisno, P. (2013) terdapat 6 metode yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka menaikkan rasio tabungan inkremental bagi mobilisasi volume keuangan pembangunan yang diperlukan diantaranya: kontrol fisik langsung, peningkatan tarif pajak yang ada, penerapan pajak baru, surplus dari perusahaan negara, pinjaman pemerintah yang tidak bersifat inflasioner dan, keuangan deficit.

Untuk Mendorong Investasi Optimal Secara Sosial.

Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara sosial, dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tanggungan negara secara serentak berupaya memacu laju pembentukan modal. Nantinya investasi optimal secara sosial bermanfaat dalam pembentukan pasar yang lebih luas, peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya produksi.

Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja.

Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolaan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan Negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan dan lain-lainnya sehingga dari pengupayaan langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Namun, langkah ini harus juga diiringi dengan pelaksanaan program pengendalian jumlah penduduk.

Untuk Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Ditengah Ketidakstabilan Internasional.

Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan internal dan eksternal. Dalam rangka mengurangi dampak internasional fluktuasi siklus pada masa boom, harus diterapkan pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyedot rejeki nomplok yang timbul dari kenaikan harga pasar. Sedangkan bea impor yang tinggi pada impor barang konsumsi dan barang mewah juga perlu untuk menghambat penggunaan daya beli tambahan.

Untuk Menanggulangi Inflasi.

Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajak seperti ini cenderung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi.

Untuk Meningkatkan Dan Mendistribusikan Pendapatan Nasional.

Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi, upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai sektor perekonomian.

Pengaruh Resiko Kebijakan Fiskal.

Risiko Fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan defisit APBN yang disebabkan oleh sesuatu di luar kendali pemerintah. Pengungkapan risiko fiskal sangat perlu untuk empat tujuan strategis, yaitu: Peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pengelolaan kebijakan fiskal, Meningkatkan keterbukaan fiskal, Meningkatkan tanggung jawab fiskal, Menciptakan kesinambungan fiskal.

Menurut Ferry Prasetya. (2011) risiko fiskal dikelompokkan dalam empat kategori utama yaitu: **(1) Resiko Ekonomi Makro.** Dalam penyusunan APBN indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga sertifikat Bank Indonesia, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia dan lifting minyak. Indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan penghitungan besaran-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN. Secara umum sumber risiko fiskal yang dihadapi oleh APBN 2012 terutama berasal dari dua resiko utama, yakni inflasi dan harga minyak. **(2) Kewajiban Kontijensi Pemerintah Pusat.** Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. Kewajiban kontijensi pemerintah pusat yang menjadi resiko fiskal bersumber dari pemberian dukungan dan/atau pinjaman pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, kewajiban yang timbul akibat program pensiun dan tabungan hari tua pegawai negeri. **(3) Desentralisasi Fiskal.** Kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Republik Kesatuan Indonesia. Dalam hal pelaksanaannya, penerapan kebijakan ini selain menghasilkan hal-hal positif sebagaimana yang diharapkan ternyata juga berpotensi menimbulkan risiko fiskal. Risiko Fiskal dari desentralisasi fiskal diantaranya, bersumber dari kebijakan pemekaran

daerah, tunggakan pemerintah daerah atas pengembalian penerusan pinjaman dari luar negeri dan rekening pinjaman daerah serta pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah.

Peranan Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian.

Menurut Rahayu, S. K. (2013) peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah kebanyakan negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan nasional. Ini berarti bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar. Untuk negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti misalnya keadaan dimana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus menerus defisit, dan sebagainya.

Bagi negara-negara yang sedang berkembang, pemerintah pada umumnya menyadari akan rendahnya investasi yang timbul atas inisiatif dari masyarakat sendiri. Bahwa untuk meningkatkan tingkat hidup suatu masyarakat, kapasitas produksi nasional perlu ditingkatkan. Untuk memperbesar kapasitas produksi nasional dibutuhkan adanya capital formation. Dengan demikian, berarti masyarakat perlu mengadakan investasi yang cukup besar untuk terwujudnya capital formation yang dibutuhkan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan fiskal yaitu meningkatkan laju investasi, Untuk Mendorong Investasi Optimal Secara Sosial, Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja, Untuk Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Ditengah Ketidakstabilan Internasional, Untuk Menanggulangi Inflasi, Untuk Meningkatkan Dan Mendistribusikan Pendapatan Nasional. Kemudian adapun peran dari kebijakan fiskal dalam perekonomian yaitu: peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti misalnya keadaan dimana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus menerus defisit, dan sebagainya

DAFTAR REFERENSI

- Adiningsih, Sri. (2013). *Koordinasi dan interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter: Tantangan ke depan*. Jakarta: Penerbit Kanisius.
- Adiyanta, F. S. (2020). Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 2, ISSN : 2621-2781.
- Ali, H., & Lima Krisna, N. (2013). *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*. Deepublish:Yogyakarta.
- Ferry Prasetyia. (2011). Rekonstruksi Sistem Fiskal Dalam Bingkai Konstitusi. *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 5 No. 2 Oktober 2011.
- M, Suparmoko. (2013). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE, Edisi Keenam.
- Mankiw, N. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, H. (2018). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Kinerja Makroekonomi di Indonesia dengan Model Structural Vector Autoregression (SVAR), EISSN: 2541-1470. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*.
- Sudirman, I. Wayan. (2011). *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Jakarta: Kencana.
- Mangun, N. (2011). Kebijakan Fiskal Menurut Fungsi di Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. *Media Litbang Sulteng IV* (2), ISSN : 1979-5971.
- Soetrisno, P. (2013). *Dasar-dasar Kebijakan Ekonomi dan Kebijaksanaan Fiskal*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Ani Sri., (2014). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.